



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI I



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI I**

**Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.
Ketua : Rendy Alvaro, S. Sos., M.E.**

Anggota :
**Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Satrio Arga Effendi, S.E.
Mujiburrahman, S.E., M.Si.**

Tim Kreatif :
**Satrio Arga Effendi, S.E.
Nadya Ahda, S.E.
Leo Iskandar, S.E.
Orlando Raka Bestianta, S.E.
Fadila Puti Lenggo Geni, S.E., M.M.**

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian Dan Lembaga 2023” yang disusun oleh Bidang Politik dan Keamanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dapat terselesaikan.

Penyusunan buku ini sebagai wujud nyata dalam mendukung fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada siklus Pembicaraan Pendahuluan. Pada siklus ini, pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2023 pada tanggal 20 Mei 2022. Kemudian DPR RI menyelenggarakan rapat kerja komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan pada 2-10 Juni 2022. Rapat kerja tersebut dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA KL) yang kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dijadikan acuan.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya.

Buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi I, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikianlah, buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023” yang disusun dan sajikan oleh Bidang Politik dan Keamanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Besar harapan saya, buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI pada komisi I dalam melaksanakan fungsi anggaran. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi substansi dan penyajian buku ini. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat.

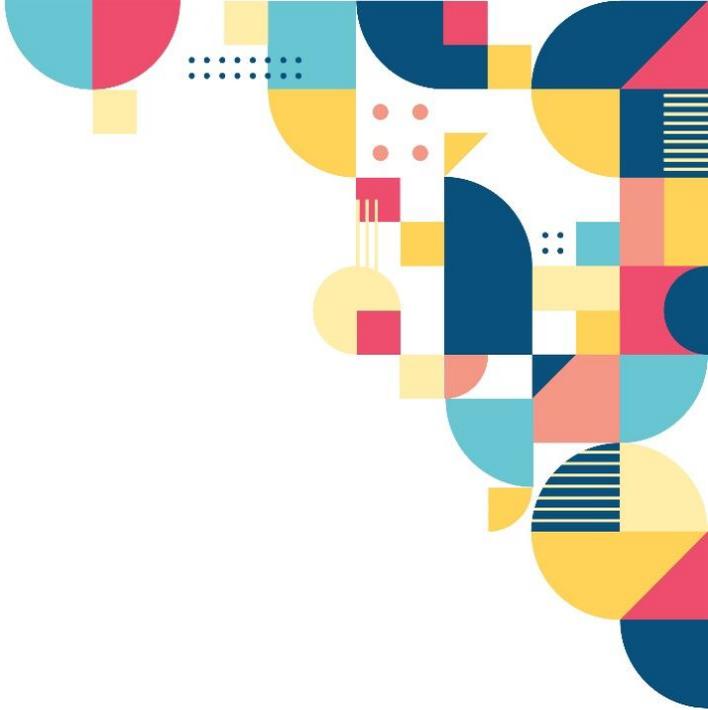
Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001

Daftar isi

Kata Pengantar.....	iii
Pagu Indikatif Badan Keamanan Laut.....	1
Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri.....	5
Pagu Indikatif LPP TVRI.....	11
Pagu Indikatif Kemenkominfo.....	15
Pagu Indikatif BSSN	21



KOMISI I





PAGU INDIKATIF BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) TAHUN 2023

Pagu indikatif Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2023 meningkat sebesar 50,59% dibandingkan dengan pagu APBN 2022. Jumlah tersebut naik dari Rp423,6 miliar pada pagu APBN 2022 menjadi Rp637,9 miliar pada pagu indikatif 2023. Meningkatnya alokasi pagu indikatif 2023 mendorong peningkatan pagu untuk program dukungan manajemen sebesar 21,01% atau naik dari Rp289,9 miliar menjadi Rp350,8 miliar. Sedangkan alokasi anggaran untuk program keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai 114,73%. Anggaran untuk dukungan manajemen pada 2023 masih lebih dominan (54,99%) dibandingkan dengan program keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia (45,01%). Namun demikian, meningkatnya anggaran Bakamla pada 2023 mendorong peningkatan dominasi alokasi anggaran untuk program keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebesar 13,44 pp (naik dari 31,56% pada 2022 menjadi 45,01 pada 2023). Namun, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen menurun sebesar minus 13,44 pp (turun dari 68,44% pada 2022 menjadi 54,99% pada 2023).

Tabel.1 Pagu Indikatif Bakamla

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
Bakamla	423,6	423,6	637,9	50,6
Program Dukungan Manajemen	164,7	289,9	350,8	21,0
Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	258,9	133,7	287,1	114,7

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis Bakamla RI

Adapun beberapa hal yang menjadi isu strategis dan menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Kedepan Bakamla akan melanjutkan kegiatan prioritas untuk penyelenggaraan patroli pengamanan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia di wilayah Natuna, sebagaimana pada kegiatan prioritas tahun 2022. Dimana pada tahun tersebut Bakamla melakukan pengadaan senjata amunisi dan UAV dan mengadakan patroli bersama dalam negeri sebanyak 10 operasi.
- b. Kedepan masih terdapat beberapa ancaman keselamatan dan keamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia berupa: pelanggaran wilayah oleh kapal asing, perompakan bersenjata, kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime/TOC*), kecelakaan laut, penangkapan ikan ilegal, pencemaran, terorisme dan invasi. Ancaman TOC sangat berbahaya seperti penyelundupan, perbudakan, narkoba, gangguan keamanan pada *trading* komoditas minerba. Oleh karena itu, Bakamla harus mampu mengendalikan dan atau bahkan meminimalisir segala bentuk ancaman di perairan Indonesia dengan meningkatkan anggaran pada program prioritas di luar program dukungan manajemen yang saat ini masih lebih dominan.

Catatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Opini Laporan Keuangan Bakamla tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah sebelumnya di tahun 2019 BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) akibat adanya permasalahan persediaan, pencatatan peralatan dan mesin yang tidak konsisten dan tidak rinci, penyajian PNBPN, pelaksanaan belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan dan penyajian dan pengungkapan informasi dalam CaLK yang belum memadai.

Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pada 2023, Bakamla perlu memperhatikan temuan BPK yang termuat dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Bakamla Tahun 2020. Terdapat beberapa permasalahan didalam pengelolaan anggaran Bakamla yang perlu mendapat perhatian, dengan pokok-pokok temuan:

- a. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas tidak memadai.
- b. Administrasi penitipan persediaan amunisi belum sepenuhnya memadai.
- c. Pengelolaan barang hasil kegiatan pengadaan monitoring satelit, *backbone coastal* dan *long range camera* belum memadai.
- d. Realisasi pembayaran kontrak pengadaan BBM tidak sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas, maka Bakamla perlu:

- a. Menyusun ketentuan pengelolaan kas secara lengkap dan jelas, yang meliputi mekanisme pengajuan, penggunaan, pertanggungjawaban, serta pembukuan dan pelaporan kas.
- b. Melakukan revisi PKS Nomor SP-001/Bakamla/I/2020 dan Nomor PKS/2/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan mengakomodir jenis barang amunisi dan lokasi gudang yang dapat digunakan untuk penitipan penyimpanan amunisi milik Bakamla.
- c. Memerintahkan Kepala Biro Sarana dan Prasarana, dan Direktur Data dan Informasi Bakamla melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas barang-barang hasil kegiatan pengadaan LRC, BCSS dan Monitoring Satelit (Satmon) dalam rangka pemanfaatan BMN secara optimal, dengan mengikutsertakan tenaga ahli independen.
- d. Melakukan konsultasi kepada pihak Kementerian Keuangan dhi. Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk memperjelas status pengenaan PPh Migas tarif 0,3% dan PPh Pasal 22 tarif 1,5% sebesar Rp2.282.028.194,70 dengan rincian kepada:

- PT LP sebesar Rp241.280.046,00 (Rp40.213.341,00 + Rp201.066.705,00).
- PT PJ sebesar Rp2.040.748.148,70 (Rp245.304.450,45 + Rp1.226.522.252,25 + Rp94.820.241,00 + Rp474.101.205,00).

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2023

Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri TA 2023 sebesar Rp8.627 miliar, anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,2% dari pagu APBN 2022. Program Dukungan Manajemen memiliki alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan program lainnya (80,9%). Program Penegakan Hukum mendapat alokasi anggaran terendah (0,09%). Meskipun mendapat alokasi anggaran terendah kedua, namun untuk Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik terjadi peningkatan anggaran terbesar (18,4%) dibandingkan dengan pagu APBN 2022. Disisi lain alokasi anggaran untuk Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional mengalami penurunan dibanding dengan pagu APBN 2022 yakni mencapai minus 2,8%.

Tabel.1 Pagu Indikatif Program Kementerian Luar Negeri

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8.046,5	8.046,5	8.627,0	7,2
Program Dukungan Manajemen	6.555,5	6.512,2	6.979,0	7,2
Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	309,0	391,2	380,4	-2,8
Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	937,4	929,4	1.015,9	9,3
Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	235,4	206,3	244,3	18,4
Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9,1	7,4	7,5	1,4

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis Kementerian Luar Negeri

Adapun beberapa hal yang menjadi isu strategis dan menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

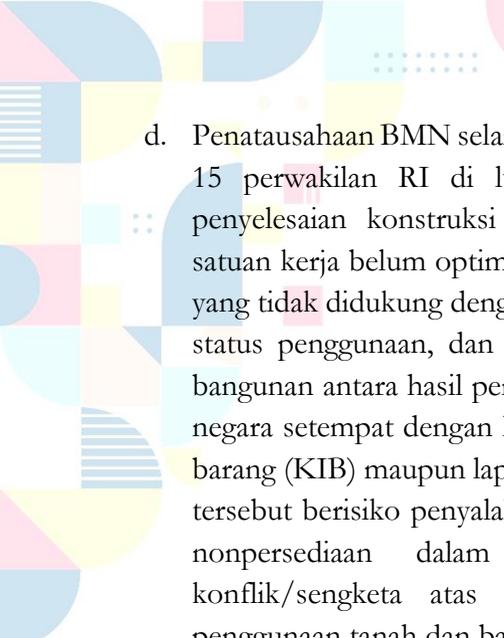
- a. Peningkatan anggaran pada Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik pada 2023 mengindikasikan bahwa, salah satu hal yang penting dan menjadi prioritas diplomasi Indonesia yaitu perlindungan warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri, baik perlindungan dari kemungkinan permasalahan kasus WNI di luar negeri ataupun ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina yang saat ini juga masih berlangsung dan diproyeksikan akan berlangsung lama hingga 2023.
- b. Pada tahun 2023 Indonesia akan kembali menjadi Ketua ASEAN. Ini merupakan momentum penting dalam peningkatan peran Indonesia di dunia internasional. Serta diharapkan Kementerian Luar Negeri dapat berkontribusi secara maksimum dalam mensukseskan presidensi Indonesia di ASEAN pada 2023 dan pentingnya adaptasi dan penyesuaian dalam diplomasi, sehingga tetap relevan dengan tuntutan kepentingan nasional dan dirasakan manfaatnya bagi rakyat.
- c. Alokasi anggaran untuk Program Diplomasi Internasional seharusnya semakin ditingkatkan bukan sebaliknya. Mengingat masih lemahnya diplomasi internasional Indonesia dalam kasus Laut Natuna sebagai dampak konflik Laut China Selatan (LCS). Hal ini ditunjukkan dari masih adanya pelanggaran kedaulatan laut Indonesia yang dilakukan oleh China. Kemudian, diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus tetap ditingkatkan pada 2023. Disamping itu, perlu didorong diplomasi pertahanan sehingga ancaman terhadap pertahanan negara pada masa depan dapat diminimalisir atau dapat dikendalikan dari konflik yang mungkin akan melebar karena perang Rusia-Ukraina.

Catatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Opini Laporan Keuangan Kemlu tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Kemlu telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pada 2023, Kemlu perlu juga memperhatikan temuan BPK yang termuat dalam IHPS I 2020. Terdapat beberapa permasalahan didalam pengelolaan anggaran Kemlu yang perlu mendapat perhatian, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dan jasa pada tujuh paket pekerjaan di dua satuan kerja pusat dan dua perwakilan RI di luar negeri tidak sesuai ketentuan. Terdapat penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak memadai, proses pemilihan penyedia yang tidak memenuhi prinsip persaingan yang sehat, realisasi pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, dan realisasi belanja mendahului prestasi pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan risiko ketidakwajaran harga dan realisasi belanja modal yang tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- b. Selisih rekonsiliasi saldo kas pada lima perwakilan RI di luar negeri belum seluruhnya dapat diselesaikan. Hal tersebut berisiko terjadinya penyalahgunaan kas dan salah saji saldo kas dalam laporan keuangan serta berpotensi membebani anggaran tahun berikutnya;
- c. Penatausahaan persediaan pada tiga satuan kerja pusat dan empat perwakilan RI di luar negeri belum diselenggarakan dengan tertib. Terdapat satuan kerja yang belum memiliki prosedur operasi standar (POS) pengelolaan persediaan yang memadai, pencatatan transaksi kurang tertib, dan pelaksanaan inventarisasi fisik persediaan tidak akurat. Hal tersebut berisiko terjadi penyalahgunaan dan/atau kehilangan barang persediaan serta terdapat saldo persediaan yang tidak dapat diyakini kewajarannya;

- 
- d. Penatausahaan BMN selain persediaan pada 3 satuan kerja pusat dan 15 perwakilan RI di luar negeri belum tertib. Di antaranya penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada empat satuan kerja belum optimal, penggunaan tanah dan/atau bangunan yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan/atau penetapan status penggunaan, dan terdapat perbedaan data luas tanah dan bangunan antara hasil pengukuran ulang maupun data dari otoritas negara setempat dengan luas yang tercantum pada kartu inventaris barang (KIB) maupun laporan penilaian kembali (LPK) DJKN. Hal tersebut berisiko penyalahgunaan, kehilangan, dan salah saji BMN nonpersediaan dalam laporan keuangan serta potensi konflik/sengketa atas ketidakjelasan status kepemilikan dan penggunaan tanah dan bangunan yang bermasalah.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas, maka Kemlu perlu:

- a. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan realisasi anggaran belanja, serta memperingatkan PPK dan Pokja Pemilihan agar dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menetapkan rencana aksi, mekanisme, dan tenggat waktu penyelesaian selisih rekonsiliasi saldo kas berdasarkan hasil penelusuran dan perbaikan pembukuan yang telah dilakukan;
- c. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan persediaan, serta lebih cermat dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk penyelenggaraan inventarisasi fisik; dan

- d. Menyelesaikan sengketa pengakuan kepemilikan tanah dan/atau gedung dan bangunan yang digunakan/dikuasai Kementerian Luar Negeri, serta menyusun dan menetapkan mekanisme dan prosedur baku terkait penyelesaian perbedaan luasan objek penilaian kembali BMN berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan perwakilan.



PAGU INDIKATIF LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) TAHUN 2023

Pagu indikatif Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menurun sebesar 8,5% pada 2023. Jumlah anggaran LPP TVRI turun dari Rp1,695,8 miliar pada 2022 menjadi Rp1,552 miliar pada 2023. Turunnya alokasi anggaran LPP TVRI mendorong penurunan alokasi anggaran untuk program manajemen sebesar 2,9% dari Rp907,4 miliar pada pagu APBN 2022 menjadi Rp881,4 miliar pada 2023, serta penurunan pada program penyiaran publik sebesar 15% atau turun dari Rp788,4 miliar pada 2022 menjadi Rp670,5 pada 2023. Alokasi pagu indikatif LPP TVRI masih lebih besar untuk program dukungan manajemen (56,7%) dibandingkan program penyiaran publik yang hanya 43,2%. Program dukungan manajemen mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar 0,03 pp sedangkan program penyiaran publik mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar 0,9 pp.

Tabel.1 Pagu Indikatif LPP TVRI

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
LPP TVRI	1.470,7	1.695,8	1.552,0	-8,5
Program Dukungan Manajemen	789,2	907,4	881,4	-2,9
Program Penyiaran Publik	681,5	788,4	670,5	-15,0

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis LPP TVRI

Adapun beberapa hal yang menjadi isu strategis dan menjadi perhatian adalah sebagai berikut

- a. Kedepan LPP TVRI masih fokus pada sasaran strategis melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur penyiaran, hal tersebut sebagaimana pada kegiatan prioritas tahun 2022, yakni dilaksanakan melalui program transformasi digital dengan pemanfaatan penuntasan infrastruktur TIK. Infrastruktur ini diperlukan guna untuk menunjang kapasitas siaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah melalui jaringan satelit dan Pay TV di dalam maupun luar negeri.
- b. Dalam Prioritas Nasional (PN), LPP TVRI mendukung pelaksanaan PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta PN 5 yakni, memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kedepan peran LPP TVRI dalam membangun kesadaran masyarakat akan isu krusial agar dapat lebih ditingkatkan, sehingga SDM berkualitas dan berdaya saing mengalami peningkatan.
- c. Hingga saat ini, TVRI memiliki jangkauan siaran yang paling luas, dibandingkan televisi swasta dan jaringan yang ada saat ini. Bahkan, jangkauan siaran TVRI dapat diterima hingga wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga. Namun berdasarkan riset Nielsen yang dirilis pada bulan April 2022 oleh Group MNC, secara keseluruhan TVRI memperoleh 1,4% dari total kepemirsaaan televisi di Indonesia. Angka ini masih sedikit lebih baik dibandingkan Metro TV dengan angka 1,2%. Stasiun TV di bawah naungan MNC yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews berhasil memperoleh khalayak paling besar di angka 44,8%. Angka ini disusul oleh pangsa pasar gabungan dua TV di bawah naungan SCM, SCTV dan Indosiar dengan perolehan 27,6%.

Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI bisa dibidang memperoleh kepemirsaaan yang sangat kecil dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta. Untuk itu perlunya peningkatan dalam penyelenggaraan penyiaran sehingga mampu bersaing dengan Lembaga TV lainnya, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Catatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Opini Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan LPP TVRI telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pada 2023, LPP TVRI perlu memperhatikan temuan BPK yang termuat dalam pemeriksaan Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2020. Terdapat beberapa permasalahan di dalam pengelolaan anggaran LPP TVRI yang perlu mendapat perhatian, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendapatan PNBPN belum sesuai dengan ketentuan yang terdiri dari pungutan atas sewa tanah tidak didukung perjanjian kerja sama dan digunakan langsung, belum dapat dipungut, kurang pungut, dendanya tidak dipungut dan kurang pungut PPN atas pendapatan PNBPN.
- b. Pengadaan LED *lighting set studio* untuk empat stasiun TVRI daerah tidak sesuai ketentuan yang terdiri dari penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan, perencanaan lelang yang tidak memadai, evaluasi lelang yang tidak objektif, kemahalan harga dan kelebihan pembayaran pekerjaan.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas, maka LPP TVRI perlu:

- a. Memutakhirkan Prosedur Operasional Standar Penagihan Denda Piutang.
- b. Membuat dan melakukan amandemen yang dilakukan atas perjanjian kerja sama pemanfaatan aset.
- c. Menagih pembayaran atas pendapatan PNBPN yang tidak didukung perjanjian kerja sama dan digunakan langsung, belum dipungut, kurang dipungut dan kurang pungut PPN serta menyetorkannya ke kas negara.
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Perencanaan Teknis, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan terkait.
- e. Menagih dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan.

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Pagu Indikatif Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp18.451,1miliar, turun sebesar 15,4% dari APBN 2022. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelaksanaan program-program antara lain:

Tabel.1 Pagu Indikatif Program Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.759,0	21.798,1	18.451,1	-15,4
Program Dukungan Manajemen	1.372,1	1.801,1	1.667,7	-7,1
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4.216,5	4.192,0	3.427,6	-18,2
Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	835,2	725,6	718,3	-1,0
Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	15.097,1	14.693,0	12.510,3	-14,9
Program Komunikasi Publik	238,2	386,3	127,2	-67,1

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Beberapa capaian dan target output prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

Tabel.2 Capaian Output Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika

Output Prioritas	Capaian Output 2021	Target 2022	Target 2023
Penyediaan BTS di daerah 3T dan operasional BTS	4.197 lokasi	2.344 lokasi dan 5.882 lokasi	4.069 lokasi dan 3.465 lokasi
Penyediaan akses internet di daerah 3T dan operasional BTS	4.716 lokasi (penyediaan akses internet)	9.463 lokasi (operasional BTS)	56.000 lokasi dan 38.391 lokasi
<i>Digital talent scholarship</i>	108.053 orang yang tersertifikasi	186.000 orang yang tersertifikasi	40.000 orang yang tersertifikasi
Literasi digital	12.307.498 orang	5.500.000 orang	12.448.750 orang

Sumber: Kemenkominfo, 2022

Dari tabel output diatas menggambarkan bahwa target output pada tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2021 tidak hanya difokuskan pada penyediaan BTS dan akses internet saja namun juga mempertimbangkan operasional BTS dan akses internet. Output digital talent scholarship mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian output 2021 maupun 2023. Sementara output literasi digital pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Isu Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dari program diatas menunjukkan bahwa, alokasi pada seluruh program mengalami penurunan. Dimana penurunan yang paling signifikan berada pada program komunikasi publik, yakni mencapai 67%. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), masih menjadi program yang memiliki anggaran terbesar diantara program lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. Hal tersebut mengingat masih adanya tantangan dalam penyediaan infrastruktur yang di gambarkan dari belum meratanya infrastruktur digital. Berdasarkan laporan tahunan Kominfo 2020, sebanyak 83.218 desa/kelurahan di Indonesia telah terkoneksi layanan 4G, sementara masih terdapat 12.548 desa/kelurahan, dengan rincian sebanyak 9.113 desa atau kelurahan pada wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), serta

sebanyak 3.435 desa/kelurahan non 3T yang belum terliput layanan akses 4G. Selain itu juga masih adanya 46,2% penduduk belum mengakses internet (BPS, 2021).

Masyarakat yang terhubung dengan internet *fixed broadband* juga masih sangat terbatas yakni sebesar 4 persen dari masyarakat yang terhubung jaringan internet. Padahal koneksi internet dengan *fixed broadband* jauh lebih stabil dan mampu meningkatkan PDB per kapita 0,9-2 poin, jika lebih dari 50 persen akses masyarakat menggunakan jaringan *fixed broadband*. Meskipun terdapat peningkatan akses internet serta penggunaan internet, Indonesia masih belum mampu bersaing terkait kualitas kecepatan akses internet. Kondisi rendahnya kualitas kecepatan akses internet juga masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Speedtest Global Index 2022, Indonesia berada pada posisi 103 dari 140 negara di dunia dalam hal kecepatan akses internet mobile, dan posisi 115 dari 179 negara di dunia dalam kecepatan *fixed broadband* jauh berada di bawah negara Singapura (2), Thailand (4), maupun Malaysia (37).

Diperlukan upaya percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK yang didukung oleh seluruh pihak, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, bersama-sama memastikan keamanan, kemudahan penggelaran infrastruktur, dan menyelaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Kualitas dan kecepatan untuk layanan *fixed* maupun *mobile broadband* perlu ditingkatkan agar masyarakat, pemerintah, pelaku industri di seluruh Indonesia dapat secara optimal memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan daya saing ekonomi.

Catatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

1. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Opini Laporan Keuangan Kemkominfo tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Kemkominfo

telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pada 2023, Kemkominfo perlu juga memperhatikan temuan BPK yang termuat dalam IHPS I 2020. Terdapat beberapa permasalahan didalam pengelolaan anggaran Kemkominfo yang perlu mendapat perhatian, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Kemkominfo Belum Selaras dengan Kebijakan Akuntansi Pusat dan SAP.
- b. Kebijakan Akuntansi Kemkominfo atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tidak Sesuai SAP.
- c. Perpanjangan Izin Penggunaan Pita Frekuensi Radio (IPFR) Belum Memadai.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas, maka Kemkominfo perlu:

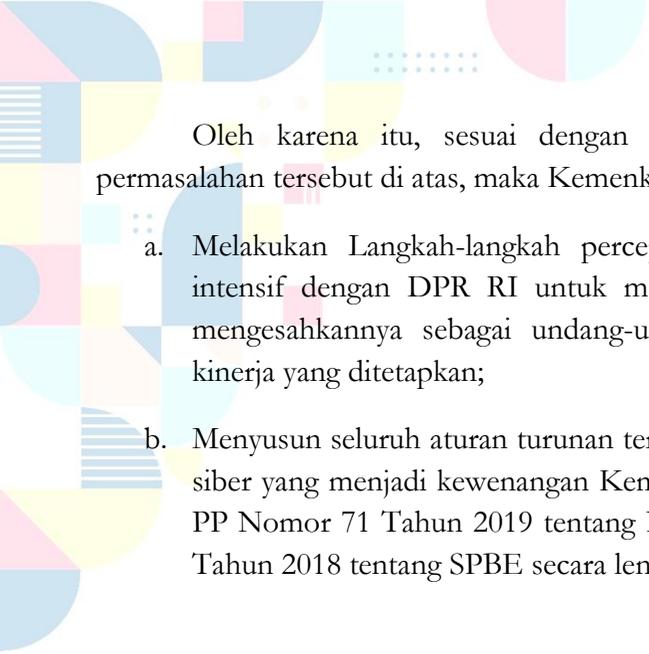
- a. Menyesuaikan Pedoman Menteri Kominfo tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kemkominfo terkait pengakuan dan Pencatatan Pendapatan LO, Pendapatan Diterima Di Muka, dan Piutang sesuai dengan PMK tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- b. Merevisi Kebijakan Akuntansi penilaian dan alokasi serta penyajian dan pengungkapan BPPTT sesuai dengan SAP.
- c. Membuat pedoman teknis yang mengatur perpanjangan IPFR secara jelas dalam Peraturan Menteri.
- d. Menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur secara jelas dan detail penggunaan bersama spektrum frekuensi radio (IPFR), kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, serta pengalihan IPFR

ke penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan mempertimbangkan optimalisasi PNBPN, kesehatan industri telekomunikasi, dan pertimbangan lainnya terkait PP Nomor46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 (IHPS II 2021)

Berdasarkan laporan IHPS II 2021, hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (Legal), standardisasi, prosedur, dan protokol (Technical), kelembagaan/organisasi (Organizational), pengembangan kapasitas (Capacity Development), dan kerja sama (Cooperation) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional, di antaranya:

- a. Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait PSTE dan SPBE belum disusun secara integratif dan memadai, akibatnya perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan, serta terhambatnya pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Standar/prosedur/protokol terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data. Akibatnya tingkat kepatuhan K/L, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah, dan PSE lingkup publik maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data.



Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas, maka Kemenkominfo perlu:

- a. Melakukan Langkah-langkah percepatan dan komunikasi yang intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai undang-undang, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- b. Menyusun seluruh aturan turunan terkait keamanan dan ketahanan siber yang menjadi kewenangan Kemenkominfo khususnya terkait PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara lengkap.

PAGU INDIKATIF BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TAHUN 2023

Pagu indikatif Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 yaitu sebesar Rp662,4 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan 12% dibandingkan APBN tahun 2022 sebesar Rp554,6 miliar. Kenaikan anggaran tersebut disebabkan oleh meningkatnya anggaran Program Dukungan Manajemen, dari Rp401,8 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp504 miliar pada tahun 2023, atau naik sebesar 25%. Meski begitu, terdapat penurunan anggaran pada Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara, dari Rp152,8 miliar tahun 2022 menjadi Rp118,3 miliar tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 23%.

Tabel.1 Pagu Indikatif Program Badan Siber dan Sandi Negara

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
BSSN	554,6	554,6	622,4	12%
Program Dukungan Manajemen	401,8	401,8	504,0	25%
Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	152,8	152,8	118,3	-23%

Sumber: KEM PPKF 2022, APBN 2022, KEM PPKF 2023.

Isu Strategis Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun beberapa hal yang menjadi isu strategis dan menjadi perhatian adalah sebagai berikut

1. Dalam APBN TA 2022, BSSN mengampu kegiatan prioritas, “Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber”, dengan fokus utamanya pembangunan kapabilitas *multistakeholder* dalam deteksi

dini dan penanganan insiden keamanan siber. Kegiatan ini dicapai melalui output prioritas, diantaranya sebagai berikut: 1) pembentukan *Government Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) pada Sektor Pemerintah; 2) pembentukan CSIRT pada Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN); 3) pembangunan kapasitas Nat-CSIRT; 4) perluasan cakupan *National Security Operations Center* (NSOC); 5) peningkatan kompetensi SDM Keamanan siber; 6) penguatan *national data center* berstandar internasional; 7) Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D; dan 8) pembangunan perangkat Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPTI). Selanjutnya dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak covid-19.

2. BSSN juga terus memberikan literasi *Cyber Hygiene* melalui berbagai sosial media seperti Instagram, twitter, youtube dan lain-lain kepada masyarakat. Literasi tersebut berisikan tentang pentingnya beraktifitas di dunia siber secara aman terlebih dengan meningkatnya *traffic* internet dimasa pandemi Covid-19 terutama oleh pengguna ritel/*broadband* perumahan sebagai dampak aktifitas masyarakat yang banyak dilakukan di dalam rumah.
3. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh BSSN, pada tahun 2021 tercatat ada lebih dari 1,6 miliar serangan siber dengan kategori anomali terbanyak adalah *malware, trojan*, serta pengumpulan informasi yang ditujukan untuk mencari celah pada sistem keamanan perangkat. Kemudian, sektor tertinggi yang mendapatkan serangan siber di Indonesia berada di bidang akademik, disusul oleh sektor swasta, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hukum, dan personal. Selain aktivitas anomali tersebut, tren serangan di Indonesia juga ada yang berupa pelanggaran data, serangan *ransomware*, merubah tampilan website, hingga *Advanced Persistent Threats* (APT).

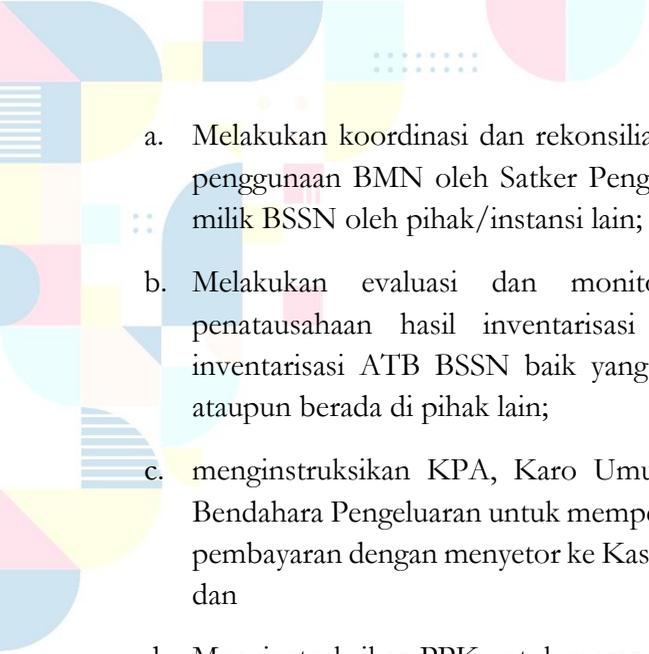
4. Hingga kuartal pertama tahun 2022, tercatat ada lebih dari 11 juta serangan siber (*cyber attack*) di Indonesia. Data tersebut dihimpun oleh sebuah perusahaan Keamanan Siber Kaspersky. Tingginya jumlah ancaman dan serangan siber ini ditengarai oleh semakin meningkatnya jumlah orang yang melakukan aktivitas melalui jaringan internet, seperti metaverse, NFT, transaksi kripto, dan lain-lain. Dalam catatan Kaspersky, ada sebanyak 11.802.558 ancaman siber yang telah terdeteksi dan diblokir sejak periode Januari hingga Maret 2022. Jumlah tersebut 22% lebih tinggi dibandingkan periode sama di tahun 2021 sebesar 9.639.940 serangan. Meskipun terdapat peningkatan secara *yoj*, namun secara kuartal mengalami penurunan dari kuartal empat tahun 2021 sebesar 2%. Dengan data tersebut, Indonesia menempati ranking teratas di Asia Tenggara dan 60 di dunia pada kategori ancaman siber.

Catatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BSSN Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Tertib;
- b. Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) Belum Tertib;
- c. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direalisasikan Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp278,01 Juta; dan
- d. Pengadaan 15 Paket Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp956,90 Juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BSSN antara lain agar:

- 
- a. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait atas penggunaan BMN oleh Satker Pengguna BSSN dan pemanfaatan milik BSSN oleh pihak/instansi lain;
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan penatausahaan hasil inventarisasi ATB yang dilakukan tim inventarisasi ATB BSSN baik yang berada di lingkungan BSSN ataupun berada di pihak lain;
 - c. menginstruksikan KPA, Karo Umum, Karo Renkeu, PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyeter ke Kas Negara sebesar Rp278,01 juta; dan
 - d. Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyeter ke Kas Negara sebesar Rp931,85 juta.

